

Strategi Geopolitik Indonesia dalam Mewujudkan Poros Maritim Dunia

Abdul Latief Gunarya

program studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: abdul2015.al53@gmail.com

Kata Kunci:

geopolitik, Indonesia, kepentingan nasional, keamanan maritim, posisi strategis, sumber daya alam.

Keywords:

geopolitics, Indonesia, national interest, maritime security, strategic position, natural resources.

ABSTRAK

Geopolitik merupakan kajian yang memadukan dimensi geografis dan politik dalam proses pengambilan keputusan strategis suatu negara. Sejak diperkenalkan oleh Friedrich Ratzel dan dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Rudolf Kjellén dan Halford Mackinder, geopolitik menjadi instrumen penting dalam memahami interaksi antarnegara, terutama dalam konteks perebutan ruang, sumber daya, dan kekuasaan. Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak di kawasan strategis antara Samudra Hindia dan Pasifik memiliki nilai geopolitik yang tinggi. Potensi sumber daya alam yang melimpah, jalur perdagangan internasional, serta posisi lintasan antara negara-negara besar menjadikan Indonesia sebagai aktor penting dalam dinamika

regional dan global. Namun, posisi ini juga menimbulkan berbagai tantangan, termasuk ancaman terhadap kedaulatan, keamanan maritim, serta eksplorasi sumber daya ilegal. Melalui pendekatan geopolitik, Indonesia diharapkan mampu merumuskan strategi nasional yang efektif untuk mempertahankan kedaulatan dan memperkuat kepentingan nasional di tengah kompetisi global yang terus berkembang.

ABSTRACT

Geopolitics is a field of study that integrates geographical and political dimensions in the strategic decision-making processes of a state. Since it was first introduced by Friedrich Ratzel and later developed by scholars such as Rudolf Kjellén and Halford Mackinder, geopolitics has become an essential instrument for understanding international interactions, particularly in terms of territorial competition, resource control, and power dynamics. Indonesia, as the world's largest archipelagic country located strategically between the Indian and Pacific Oceans, holds significant geopolitical value. Its abundant natural resources, strategic international trade routes, and position as a maritime crossroads among major countries make Indonesia a key player in both regional and global affairs. However, this strategic position also poses various challenges, including threats to sovereignty, maritime security, and illegal resource exploitation. Through a geopolitical approach, Indonesia is expected to formulate effective national strategies to safeguard its sovereignty and strengthen national interests amid the growing intensity of global competition.

Pendahuluan

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau dan wilayah laut yang luas, memiliki posisi geografis yang sangat strategis karena terletak di antara dua benua dan dua samudra. Letak ini memberikan keuntungan besar, namun juga menghadirkan tantangan dalam konteks geopolitik dan geostrategi. Untuk mengoptimalkan potensi maritimnya, pemerintah Indonesia mengusung visi sebagai Poros Maritim Dunia sebuah gagasan yang menempatkan sektor kelautan sebagai pusat pembangunan nasional.



This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Visi Poros Maritim Dunia tidak hanya mencerminkan jati diri Indonesia sebagai negara maritim, tetapi juga menegaskan pentingnya kekuatan politik, ekonomi, dan pertahanan laut dalam menghadapi perubahan konstelasi regional dan global. Dalam hal ini, strategi geopolitik menjadi elemen krusial, karena berkaitan erat dengan posisi Indonesia dalam menghadapi kepentingan negara-negara besar, menjaga kedaulatan wilayah laut, dan memanfaatkan sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Meski demikian, pelaksanaan strategi ini tidak lepas dari berbagai hambatan, seperti kurangnya infrastruktur, ancaman terhadap keamanan maritim, serta persaingan pengaruh antara kekuatan global seperti Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik. Oleh sebab itu, diperlukan kajian yang komprehensif terhadap berbagai pendekatan strategis yang bisa diambil Indonesia untuk merealisasikan perannya sebagai Poros Maritim Dunia. Kebijakan geopolitik maritim merupakan salah satu kebijakan yang memiliki potensi besar dan mencakup berbagai aspek penting untuk dikembangkan di Indonesia. Kebijakan ini berlandaskan pada pandangan bahwa wilayah laut, selain daratan, merupakan bagian penting dari kekuatan nasional. Tokoh pemikir geopolitik, Friedrich Ratzel, mengemukakan teori ruang hidup (*living space*), yang melihat negara seperti organisme hidup yang memerlukan ruang untuk bertahan dan berkembang. Dalam konteks ini, Indonesia, dengan posisinya sebagai negara kepulauan yang strategis, berpeluang besar untuk menjadi pusat kekuatan atau *heartland* berbasis pada geopolitik kelautan.

Kondisi ini menunjukkan adanya hubungan yang bersifat relatif antara negara dengan lingkungan geografisnya. Menurut mazhab Ratzel, faktor-faktor geografis—seperti bentuk wilayah, luas, letak, sumber daya alam dan manusia—mempengaruhi arah dan kekuatan kebijakan politik suatu negara. Ia memandang bahwa pertumbuhan dan perkembangan suatu negara sangat bergantung pada kondisi geografisnya, sebagaimana organisme hidup yang dipengaruhi oleh lingkungannya. Ratzel juga meramalkan bahwa dalam dinamika politik global, negara-negara dengan kekuatan maritim dan kontinental akan bersaing untuk mendominasi dunia, dan ia menekankan bahwa wilayah Samudra Pasifik akan menjadi pusat kehidupan dan kepentingan strategis di masa depan. Presiden Jokowi memanfaatkan kondisi geografis strategis Indonesia melalui kebijakan Poros Maritim Dunia, yang mencerminkan ciri khas arah kebijakan luar negeri Indonesia di masa kepemimpinannya. Dengan memanfaatkan posisi Indonesia yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, Jokowi berupaya mengembalikan jati diri Indonesia sebagai negara kepulauan. Upaya ini didasarkan pada budaya maritim dan wawasan nusantara, serta potensi besar yang dimiliki dari lebih dari 17.000 pulau yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam debat calon presiden dan wakil presiden tahun 2014, arah kebijakan luar negeri Jokowi menitikberatkan pada beberapa aspek penting, yaitu: (1) membangun identitas budaya maritim melalui diplomasi dan kerja sama antarnegara, (2) memperkuat posisi Indonesia secara global dengan pendekatan diplomasi middle power, (3) memperluas keterlibatan dalam kerja sama kawasan Indo-Pasifik, serta (4) memperdalam praktik diplomasi publik melalui berbagai pendekatan, seperti antar-pemerintah (G to G), pemerintah ke bisnis (G to B), pemerintah ke masyarakat (G to C), dan antar-masyarakat (P to P). Beberapa pilar tersebut tercermin dalam keterlibatan Indonesia pada forum internasional seperti KTT di Beijing dan KTT Asia-Afrika di Jakarta. Lima pilar kebijakan

maritim Jokowi—yakni penguatan budaya maritim, pembangunan infrastruktur kelautan, pemanfaatan potensi sumber daya laut, diplomasi maritim, dan pertahanan laut—menunjukkan komitmennya dalam mengarahkan Indonesia pada orientasi politik kelautan atau politik spasial maritim.

Kebijakan luar negeri Jokowi juga masih membawa semangat dari era SBY dengan prinsip “seribu teman, tanpa musuh,” yang menekankan pentingnya diplomasi sebagai sarana memperluas kerja sama internasional. Namun, fokus utama Jokowi lebih ditekankan pada geopolitik maritim, sebagaimana tercantum dalam visi dan misinya. Pendekatan ini dipengaruhi oleh teori Alfred Thayer Mahan yang menyatakan bahwa kekuatan laut merupakan unsur vital dalam menguasai geopolitik global. Contohnya adalah bagaimana Amerika Serikat berhasil memanfaatkan laut sebagai sumber kekuatan ekonomi dan pertahanan.

Keseriusan Jokowi dalam mengembangkan sektor maritim terlihat nyata melalui pembentukan Badan Keamanan Laut berdasarkan Instruksi Presiden No. 178 Tahun 2014, serta pendirian Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya melalui Inpres No. 10 Tahun 2015. Kementerian ini mengoordinasikan empat Kementerian terkait, yaitu ESDM, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, dan Perhubungan. Hal ini menjadi indikator kuat bahwa Jokowi sangat memperhatikan isu-isu kelautan dan ingin menjadikan sektor maritim sebagai sumber utama kekuatan dan pendapatan nasional yang dapat diangkat ke tingkat global. Dengan pendekatan ini, Jokowi menempatkan Indonesia dalam kerangka global sebagai negara maritim yang aktif, menjadikan isu-isu domestik maritim sebagai kekuatan diplomasi atau *marketing power* dalam arena politik internasional. Hal ini tercermin dalam berbagai pidato kenegaraan yang disampaikannya di forum-forum internasional.

Pembahasan

Geopolitik merupakan suatu konsep yang telah lama disadari pentingnya sejak zaman dahulu. Perspektif manusia terhadap kondisi alam atau lingkungan dalam kaitannya dengan perilaku politik senantiasa mengalami perkembangan dan evolusi sejak pertama kali kesadaran tersebut muncul. Geopolitik mempelajari bagaimana keputusan politik dapat diambil secara tepat dan strategis dengan mempertimbangkan faktor geografis. Dalam konteks ini, "geografis" mengacu pada batas-batas wilayah antar negara yang juga mencerminkan batas-batas politis. Geopolitik berada pada persimpangan antara ilmu politik dan geografi politik, sehingga hubungan antara geografi dan politik sering disebut sebagai geografi manusia, yang prinsip dasarnya menyangkut hubungan antara perilaku politik dan fitur fisik wilayah. Artinya, terdapat hubungan yang erat antara perilaku politik suatu negara dan lingkungan geografisnya.

Secara linguistik, istilah "geopolitik" dalam bahasa Indonesia ditulis dengan huruf "k", berbeda dengan penulisan dalam bahasa Inggris yaitu "geopolitics" yang menggunakan akhiran "cs". Dalam konteks sejarah, konsep geopolitik merupakan bagian dari geostrategi Jerman yang berkembang sebagai pemikiran lanjutan dari Otto von Bismarck. Salah satu bentuk implementasi konsep ini terlihat dalam doktrin Nazi yang menyatakan bahwa kebutuhan geografis, ekonomi, dan politik Jerman dapat dijadikan

pembenaran untuk melakukan invasi serta perebutan wilayah negara lain. Doktrin ini pada dasarnya mengandung legitimasi ekspansionisme atas dasar kepentingan nasional. Gagasan tersebut dipengaruhi oleh teori yang dikembangkan oleh Friedrich Ratzel (1844–1904), seorang ahli geografi asal Jerman, yang memandang negara sebagai entitas biologis. Pandangannya sejalan dengan konsep Darwinisme sosial, di mana suatu negara, layaknya makhluk hidup, mengalami proses kelahiran, pertumbuhan, dan akhirnya kematian.

Dari penerapan teori ini dapat disimpulkan bahwa geopolitik merupakan salah satu pendekatan dalam studi hubungan internasional. Teori ini berfungsi untuk menganalisis kepentingan dan kebutuhan suatu negara dalam kaitannya dengan aspek geografis, khususnya dalam melihat interaksi antara faktor geografi dan dinamika politik. Geopolitik dapat dijadikan sebagai instrumen analisis bagi negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya, baik dalam rangka menjalin kerja sama internasional maupun menghadapi potensi konflik. Dalam hal ini, geopolitik berperan sebagai kerangka strategis yang memandu arah kebijakan suatu negara di tingkat lokal, regional, maupun global. Melalui pendekatan geopolitik, negara dapat merumuskan visi jangka panjang yang berkaitan dengan kepentingan nasional. Dalam konteks penelitian ini, teori geopolitik akan digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana kapabilitas sumber daya maritim Indonesia mendukung ambisinya menjadi poros maritim dunia. Pendekatan ini juga akan digunakan untuk membedah konsep kekuatan (power) secara menyeluruh, guna memahami dampak faktor geopolitik terhadap berbagai permasalahan kelautan yang tengah dihadapi Indonesia.

Perkembangan Geopolitik dan keterkaitan terhadap kepentingan Nasional

Teks Kajian tentang geopolitik pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli geografi bernama Friedrich Ratzel, yang mendefinisikannya sebagai *ilmu bumi politik* atau *political geography*. Selanjutnya, pemikiran ini dikembangkan oleh Rudolf Kjellén dan Karl Haushofer, yang kemudian mengganti istilah tersebut menjadi *geographical politics*. Pergantian istilah ini mencerminkan perbedaan fokus kajian—*political geography* lebih menitikberatkan pada analisis fenomena geografis dari sudut pandang politik, dengan perhatian utama pada hubungan antara lingkungan alam dan aktivitas manusia. Sementara itu, geopolitik justru mempelajari fenomena politik dengan pendekatan geografis, yang secara khusus ditujukan untuk mendukung proses pengambilan keputusan oleh aktor-aktor negara. Dalam pendekatannya, geopolitik memandang negara dan lingkungan geografis sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan. Berdasarkan pemikiran ini, geopolitik kemudian dianggap sebagai cabang ilmu politik yang mengintegrasikan pengetahuan geografi dengan negara sebagai subjek utama kajiannya. Menurut Ratzel, negara perlu memahami wilayah dan ruang sebagai dasar penting dalam merumuskan kebijakan, di mana proses pengambilan keputusan tersebut harus dilakukan dengan landasan intelektual untuk mencapai efektivitas yang maksimal.

Konsep ruang atau *lebensraum* merupakan salah satu dasar utama dalam studi geopolitik yang memposisikan negara sebagai entitas yang menempati ruang untuk menunjang kehidupan individu di dalamnya. Friedrich Ratzel melihat ruang sebagai sesuatu yang dinamis, terbentuk dari interaksi dengan lingkungan, sehingga pemahaman terhadap ruang tersebut membutuhkan proses berpikir yang mendalam

untuk bisa melindungi, mempertahankan, dan mengembangkannya. Berdasarkan pandangan ini, negara dianalogikan sebagai organisme hidup yang berkembang di dalam suatu ruang. Negara dituntut untuk mampu memenuhi kebutuhan pertumbuhan masyarakatnya. Ratzel meyakini bahwa semakin luas wilayah suatu negara dan semakin besar potensi geografis yang dimilikinya, maka semakin besar pula kekuatan nasional yang bisa dibangun. Jika suatu wilayah tidak lagi mampu menopang pertumbuhan penduduk atau kebutuhan nasional, maka negara dapat memperluas wilayahnya, termasuk dengan cara mengubah batas teritorial, demi mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Pandangan Ratzel ini kemudian melahirkan anggapan bahwa geopolitik berkaitan erat dengan perebutan kekuasaan, dan pemikiran ini sempat diadopsi oleh Adolf Hitler untuk melegitimasi ekspansi wilayah Jerman atas dasar kepentingan nasional dan ekonomi. Konsep tersebut kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Sir Halford Mackinder, seorang ahli geografi asal Inggris, yang mengajukan teori penguasaan wilayah daratan atau *Heartland Theory*. Dalam pandangannya, Mackinder menyatakan bahwa siapa pun yang menguasai wilayah jantung benua (*heartland*) akan memiliki kekuatan untuk mengendalikan *world island* dan pada akhirnya mendominasi dunia.

Perkembangan geopolitik menunjukkan bahwa hubungan antarnegara sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor geografis, seperti ketersediaan sumber daya alam, jalur perdagangan, serta aspek pertahanan dan keamanan. Perubahan dalam tatanan global sering kali dipicu oleh perebutan kepentingan yang berakar pada kondisi geografis. Sebagai aktor politik, negara berperan layaknya organisme hidup yang selalu berupaya menembus dan memanfaatkan ruang geografis demi memenuhi kebutuhan rakyatnya. Oleh karena itu, negara harus memiliki pemahaman yang mendalam terhadap wilayah yang dikuasainya agar mampu melindungi, menjamin, dan mempertahankan ruang tersebut dari berbagai ancaman yang timbul akibat interaksi global. Dari sini dapat disimpulkan bahwa geopolitik adalah ilmu yang mengkaji bagaimana dominasi faktor-faktor geografis menjadi landasan utama bagi kekuatan negara dalam mempertahankan kepentingannya dan menjamin kelangsungan hidupnya.

Posisi Indonesia dalam Geopolitik

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak di kawasan strategis Asia Pasifik. Posisi geografisnya yang berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik menjadikan Indonesia memiliki nilai geopolitik yang tinggi, terutama karena wilayahnya membentuk jalur perdagangan internasional yang melewati kedaulatannya. Sebagai negara kepulauan, Indonesia didukung oleh kekayaan sumber daya alam yang melimpah, terutama dari sektor kelautan. Sebagian besar wilayahnya berupa perairan yang memiliki potensi besar dalam bidang perikanan, tambang mineral, serta pariwisata bahari, yang menjadi pilar penting bagi perekonomian nasional.

Menteri Kelautan dan Perikanan menyampaikan bahwa pada tahun 2019 potensi sumber daya perikanan Indonesia mencapai 22,76 juta ton, dan jumlah ini terus meningkat setiap tahunnya. Selain sektor kelautan, Indonesia juga memiliki kekayaan alam lain seperti gas alam dan minyak bumi. Berdasarkan siaran pers dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2021, Menteri Arifin Tasrif menyebutkan

bahwa produksi minyak Indonesia mencapai sekitar 700 ribu barel per hari, sementara produksi gas alam mencapai sekitar 6 triliun kaki kubik standar per hari (standard cubic feet per day). Tak hanya itu, Indonesia juga memiliki garis pantai yang sangat panjang, yang menjadi salah satu aset utama dalam pengembangan pariwisata nasional. Potensi pariwisata Indonesia tidak hanya terbatas pada sektor kelautan, tetapi juga mencakup wisata daratan seperti pegunungan dan kekayaan budaya yang tersebar di berbagai wilayah.

Wilayah kepulauan Indonesia yang membentang dari Sabang hingga Merauke melahirkan beragam kebudayaan tradisional yang berbeda-beda, sesuai dengan etnis dan daerah asalnya. Dari sudut pandang geopolitik, Indonesia selalu terbuka terhadap pengaruh dari lingkungan luar. Hal ini terlihat dari sejarah panjang bangsa ini yang telah mengalami masuknya berbagai budaya seperti Hindu, Buddha, Islam, dan pengaruh Barat, yang kini menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas masyarakat Indonesia. Perubahan dan dinamika tersebut tentu memberikan dampak signifikan pada perkembangan bangsa, terutama mengingat besarnya potensi yang dimiliki. Di era modern, negara-negara berupaya memperluas pengaruh dan ruang mereka dengan berbagai cara, termasuk melalui pendekatan ekspansionis, hegemonik, maupun kolonial. Kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi perkembangan negara, khususnya dalam bidang pertahanan dan keamanan. Berdasarkan hal tersebut, konsep geopolitik tetap menjadi variabel utama yang sangat penting dalam mendorong sebuah negara untuk memperluas cakupan wilayah dan membangun hubungan dengan ruang-ruang lain. Meski berbagai upaya seperti pengembangan teknologi, pembentukan institusi internasional, dan organisasi keamanan global telah dilakukan, geopolitik masih memegang peranan krusial dalam dinamika hubungan antarnegara.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa ancaman keamanan masih menjadi tantangan serius bagi kelangsungan suatu negara. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan dalam bidang pertahanan dan keamanan. Bagi Indonesia, pertahanan dan keamanan merupakan salah satu pilar utama kekuatan nasional. Mengacu pada konsep Alfred Mahan, pemahaman yang mendalam tentang lingkungan strategis menjadi modal penting dalam menjaga dan melindungi kedaulatan negara. Secara geopolitik, posisi Indonesia sangat strategis, terutama dalam konteks pertahanan dan keamanan nasional. Wilayah Indonesia yang mayoritas terdiri dari perairan dibagi menjadi empat zona utama yang dapat dimanfaatkan untuk mengamankan kepentingan nasional serta memperkuat kekuatan maritim. Pembagian wilayah ini telah disepakati oleh pemerintah Indonesia bersama negara-negara lain guna menjamin perdamaian dan ketertiban keamanan di wilayah kedaulatan Indonesia. Kesepakatan ini dituangkan dalam pengaturan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang diakui dan disahkan oleh International Maritime Organization (IMO).

Dalam konteks perdagangan internasional, wilayah Indonesia dikelilingi oleh negara-negara produsen yang distribusi barangnya sebagian besar melewati perairan Indonesia. Misalnya, di sebelah selatan terdapat Australia yang menghasilkan sumber daya mineral seperti batubara dan nikel. Dalam skenario geopolitik, ketika Australia mengeksport produknya, rute pengiriman biasanya melewati Selat Lombok menuju Selat Makassar, dengan arah ke utara atau ke barat Indonesia melalui perairan dalam dan

Selat Makassar. Contoh lain terdapat di wilayah utara Indonesia, yakni kawasan Asia Timur yang meliputi Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan, yang juga merupakan negara produsen utama. Ketika mereka mengekspor ke Timur Tengah, barang-barang tersebut harus melewati perairan sekitar Singapura menuju Selat Malaka atau melalui wilayah Indonesia ke Selat Sunda. Kondisi ini menegaskan bahwa wilayah Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis secara geopolitik dan geoekonomi, yang menjelaskan mengapa Indonesia selalu terdampak oleh dinamika eksternal.

Selain alasan geopolitik dan geoekonomi, posisi Indonesia yang strategis juga menimbulkan tantangan besar dalam bidang pertahanan dan keamanan. Wilayah perairan Indonesia sangat krusial karena menyimpan sumber daya alam yang melimpah. Oleh karena itu, perlindungan kedaulatan membutuhkan upaya yang efektif sebagai bagian dari kepentingan nasional dalam pertahanan dan keamanan. Posisi sentral Indonesia menyebabkan berbagai ancaman, seperti pelanggaran lalu lintas laut, eksploitasi sumber daya secara legal maupun ilegal, penyelundupan, serta ancaman transnasional berupa perebutan wilayah. Dinamika ini menuntut kerja sama erat antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kedaulatan negara. Untuk itu, dibutuhkan instrumen strategis guna mengatasi berbagai persoalan tersebut sebagai upaya mempertahankan eksistensi bangsa. Perairan dan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia adalah modal utama untuk mencapai kepentingan nasional. Oleh karena itu, dalam rangka mempertahankan, mengelola, dan melindungi kedaulatan negara, diperlukan *political will* yang kuat sebagai fondasi kekuatan untuk mendorong seluruh komponen bangsa bergerak Bersama.

Kesimpulan

Kajian geopolitik menekankan pentingnya ruang dan wilayah sebagai elemen utama dalam membangun kekuatan nasional. Geopolitik bukan sekadar studi tentang geografi politik, tetapi merupakan alat strategis negara dalam merumuskan kebijakan berdasarkan kondisi geografis untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan nasional. Dalam hal ini, negara dilihat sebagai organisme hidup yang membutuhkan ruang untuk bertumbuh dan bertahan hidup. Posisi geografis Indonesia yang sangat strategis—di antara dua samudra dan dua benua, serta terletak di jalur perdagangan internasional—menjadikannya memiliki nilai geopolitik dan geoekonomi yang tinggi. Kekayaan sumber daya alam, khususnya di sektor kelautan, serta keragaman budaya dan luas wilayah menjadi modal penting bagi pembangunan nasional. Namun, posisi ini juga membawa berbagai tantangan, terutama dalam bidang pertahanan, keamanan, dan kedaulatan wilayah dari ancaman eksternal seperti penyelundupan, eksploitasi ilegal, hingga konflik kepentingan antarnegara. Dalam konteks ini, penguatan geopolitik Indonesia harus diarahkan pada perlindungan dan pengelolaan wilayah secara optimal untuk menunjang kepentingan nasional dan mewujudkan ketahanan nasional yang berkelanjutan.

Saran

1. Penguatan Strategi Pertahanan Maritim

Mengingat sebagian besar wilayah Indonesia adalah perairan, pemerintah perlu meningkatkan sistem pertahanan laut dengan memperkuat armada TNI AL, radar pengawasan, serta patroli rutin di zona-zona rawan. Hal ini penting untuk menjaga keamanan jalur pelayaran internasional dan mencegah pelanggaran kedaulatan.

2. Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam

Pemerintah harus lebih serius dalam mengelola kekayaan alam, khususnya sektor kelautan dan energi, agar tidak dieksplorasi secara ilegal oleh pihak asing. Dibutuhkan sistem pengawasan terpadu dan transparansi pengelolaan SDA agar benar-benar menjadi tulang punggung ekonomi nasional.

3. Pengembangan Wilayah Perbatasan

Wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar harus mendapatkan prioritas dalam pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan fasilitas pertahanan. Ini penting untuk memperkuat kedaulatan negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan.

4. Diplomasi Geopolitik Aktif

Indonesia perlu memainkan peran lebih aktif dalam diplomasi regional dan internasional untuk memastikan hak-hak kedaulatannya dihormati. Kerja sama strategis di sektor keamanan maritim dengan negara tetangga dan organisasi internasional seperti ASEAN, IMO, dan lainnya perlu diperkuat.

5. Peningkatan Kesadaran Geopolitik Masyarakat

Pendidikan tentang geopolitik dan pentingnya menjaga kedaulatan negara harus ditanamkan sejak dini melalui kurikulum pendidikan dan kampanye publik. Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam menjaga keutuhan wilayah NKRI.

Dengan langkah-langkah tersebut, Indonesia dapat mengoptimalkan potensi geografisnya sebagai kekuatan utama dalam mendukung kepentingan nasional dan memperkuat posisinya dalam dinamika geopolitik global.

Daftar Pustaka

Abidin, M. Z. (2018). Pengelolaan sumber daya alam laut untuk memenuhi kebutuhan perekonomian masyarakat asli Papua dalam kajian maqasid syariah: Studi kasus masyarakat nelayan Port Numbay Enggros Kota Jayapura. *Research Repository UIN Malang*. Retrieved from <http://repository.uin-malang.ac.id/5718/>

Faslah, R. (2014). Identitas Nasional, geostrategi, dan geopolitik: Membangun keberlanjutan dan kedaulatan. *Research Repository UIN Malang*, <http://repository.uin-malang.ac.id/20872/>.

- (2014,). Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Jakarta: Visi –misi Jokowi –JK, KPU.
- La Ode Muhammad Rauda Agus Udaya Manarfa, S. M. (2024). Sejarah Nasional Indonesia (sertifikat hak cipta). Research Repository UIN Malang. Retrieved from <http://repository.uin-malang.ac.id/22831/>
- Makarim, E. (2012). *Geopolitik Maritim Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Martani, A. A. (2023). Analisis Geopolitik Abad 21 di Indo-Pasifik dan Persiapan Indonesia dalam Menyikapi Konflik di Laut Cina Selatan. *Jurnal Lemhannas RI*. Retrieved from <https://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/view/479>
- Rozi, C. (2024). Nasionalisme Negara Indonesia. Research Repository UIN Malang. Retrieved from <http://repository.uin-malang.ac.id/20388/>
- Scoot, A. L. (1996). *Theories Of International Relation Trjmh*. Bandung.: Nusamedia.
- Yani, S. H. (2007). *Geografi Politik*. Bandung: PT. Rafika Aditama: .